



RILIS
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024–2025 KE PROVINSI JAMBI
6–10 DESEMBER 2024

Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 ke Provinsi Jambi pada tanggal 6–10 Desember 2024. Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ini dipimpin oleh Bapak Moh. Rano Alfath S.H, M.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI, diikuti oleh beberapa Anggota Komisi III DPR RI dari berbagai Fraksi. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi ini, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI diterima oleh Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., selaku Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Dr. Herman Dekristo, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Brigjen. Pol. Wisnu Handoko, Si.K., M.M., selaku Kepala BNN Provinsi Jambi, Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Yusuf Buchori, S.H., M.Si., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Andri Swasono, S.H., M.Kn., selaku Ketua Pengadilan TUN Jambi. Dalam kesempatan itu, Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Jambi memberikan paparan mengenai pertanyaan yang telah disampaikan oleh Komisi III DPR RI terkait fungsi anggaran dan pengawasan.

Dalam rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Jambi, secara umum membahas serapan anggaran Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah maksimal, mencapai 98%. Di samping itu, BNN Provinsi Jambi dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi di bawah Mahkamah Agung RI, menyampaikan aspirasinya mengenai kebutuhan penambahan anggaran di tahun 2025, khususnya terkait pengadaan fasilitas dan sarana prasarana kantor. Selain capaian masing-masing lembaga, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi juga menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi Mitra Kerja Komisi III DPR RI dalam rangka penegakan hukum di Provinsi Jambi. Beberapa isu yang disampaikan, seperti penertiban penambangan ilegal tanpa izin (Pertambangan Tanpa Izin/PETI) yang menjadi masalah sosial karena sebagian masyarakat Jambi menggantungkan hidupnya dari bisnis tersebut, kurangnya personel/Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi dan minimnya jumlah Hakim pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Selain itu, terdapat pula pengurangan jumlah alat tes yang digunakan Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Jambi oleh BNN Pusat sejak pandemi sampai saat ini, hingga adanya *Automatic Adjustment* (pemblokiran) anggaran yang berdampak pada persentase realisasi anggaran di beberapa satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi yang diharapkan menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi menyampaikan bahwa optimalisasi upaya penegakan hukum Mitra Kerja Komisi III DPR RI akan didukung oleh Panitia Kerja (Panja) yang telah dibentuk oleh Komisi III DPR RI, yakni Panja Sumber Daya Alam, Mafia Tanah, Narkotika, dan Kejahatan Siber. Komisi III DPR RI juga menekankan pentingnya Mitra Kerja Komisi III DPR RI dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan mengimbau untuk membentuk Satgas yang menganalisis dan menindaklanjuti kasus-kasus yang belum tertangani.

Jambi, 10 Desember 2024

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi.